

Implementasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dalam Pembangunan di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo

Oleh:

Herman Felani

Nama Dosen Pembimbing (Isna Fitria Agustina)

Progam Studi

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus, 2024

Pendahuluan

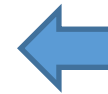
Pembangunan merupakan usaha yang disengaja dalam rangka perubahan ke arah yang lebih baik, karena pembangunan mempengaruhi hajat hidup orang banyak, maka dimaksimalkan selaras dengan tujuan pembangunan tersebut untuk kemaslahatan masyarakat. Pada hakikatnya, tujuan pembangunan adalah mewujudkan masyarakat yang setara, adil dan makmur. Pembangunan dimulai dengan rencana pembangunan untuk merencanakan program pembangunan masa depan. Sedangkan perencanaan merupakan memilah dan menghubungkan fakta dengan asumsi-asumsi terkait kondisi kedepannya, melalui perumusan dan penggambaran kegiatan yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.



Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, selanjutnya pada suatu rencana pembangunan desa, pemerintah desa harus membentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber daya desa. Tujuan pembangunan harus dilibatkan secara partisipatif untuk menggunakan dan mendistribusikan Pemerintah desa berperan penting dalam mengelola proses sosial di masyarakat.



pembangunan dan realisasi di Desa Kedungrejo memiliki prioritas yaitu pemeliharaan jalan, pembangunan jalan serta fasilitas pengelolaan sampah. Dimana ketiga prioritas ini telah di realialisasikan pada tahun 2023. Pembangunan tersebut ditujukan untuk pengembangan sarana dan prasara Desa Kedungrejo. Implementasi pembangunan tersebut telah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023.



RKP Desa merupakan dokumen rencana pembangunan tahunan yang digunakan sebagai acuan/pedoman pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah desa yang kemudian dijadikan dasar penyusunan APBDes pada tahun anggaran tertentu. Rancangan ini disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musyawarah desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Gap Permasalahan

Fasilitas Pengelolaan Sampah Belum Mempunyai Dana Yang Sesuai Dengan Kebutuhannya

Belum Optimalnya pembangunan dengan dana yang sudah di alokasikan

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)



Bagaimana Implementasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dalam Pembangunan di Desa kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo

Penelitian Terdahulu

“Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) dalam Bidang Pembangunan Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indra Girihilir oleh Abdul Halim tahun 2021 dijumpai hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dalam bidang pembangunan desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir yang dilaksanakan oleh Desa Tanah Merah yang memiliki gambaran tentang siapa yang menjadi unsur pelaksana dari program kegiatan pembangunan desa dan bagaimana pelaksanaannya. Dalam sistem pelaksanaannya belum direalisasikan secara optimal dengan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti faktor komunikasi dan faktor keadaan geografis.

“Implementasi RKP Desa Dalam Pembangunan di Desa Cisarua Kecamatan Langkap Kabupaten Pangandaran” oleh Yuni Guntari ditemukan hasil Ada empat hal yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang mutlak diantaranya, 1) Informasi, 2) Isi kebijakan, 3) Dukungan masyarakat, dan 4) Pembagian potensi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data seperti observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi rencana kerja pemerintah desa dalam pembangunan di Desa Cisarua Langkaplancar Kabupaten Pangandaran.

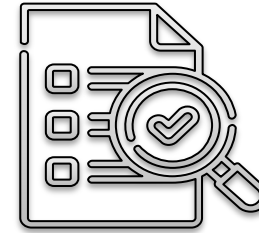
“Analisis Rencana Kerja Pemerintah (Rkp) Desa Gading Watu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2022” tahun 2022 ditemukan bahwa menunjukkan bahwa pada aspek partisipatif, Desa Gading Watu telah melibatkan seluruh unsur (aparatur, BPD, masyarakat) untuk menyusun RKPDesa. Pada aspek transparansi, diwujudkan melalui penyelenggaraan musyawarah desa, pemanfaatan website dan menampilkan banner.

Metode



Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif



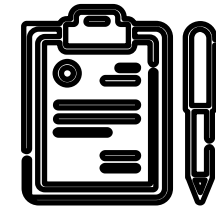
Fokus Penelitian

Implementasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dalam Pembangunan di Desa kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo



Lokasi Penelitian

Desa kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo



Teknik Pengumpulan Data
Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi

Hasil dan Pembahasan

A. Komunikasi

masyarakat telah mengetahui prioritas pembangunan infrastruktur pada RKPDes. Masyarakat mengetahui hal tersebut melalui informasi yang disampaikan oleh perwakilan tokoh masyarakat, karang taruna dan perwakilan PKK. Sehingga pada penelitian . Implementasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dalam Pembangunan di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo pada indikator komunikasi telah sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Edward III. Dimana dijumpai hasil pemerintah Desa Kedungrejo telah melakukan rapat koordinasi dalam penetapan RPKDes yang menghadirkan Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Warga, Perwakilan Karang Taruna, serta Perwakilan PKK. Hal tersebut bertujuan agar terdapat proses komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa dengan Warga Desa Kedungrejo.

Hasil dan Pembahasan

B. Sumber Daya

Implementasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dalam Pembangunan di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo pada indikator sumber daya dijumpai hasil yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya lahan yang dimiliki oleh Desa Kedungrejo dapat dikelola dengan baik. Sehingga apa yang menjadi prioritas pembangunan infrastruktur yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik.

Hasil dan Pembahasan

C. Disposisi

pemerintah Desa Kedungrejo selalu mengawal pembangunan infrastruktur sesuai dengan prioritas pembangunan yang ada di RKP Desa. Pembangunan dilakukan secara bertahap sehingga semua pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas akan terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Pada penelitian Implementasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dalam Pembangunan di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo pada indikator disposisi telah sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Edward III dikarenakan pemerintah Desa Kedungrejo telah melaksanakan pembangunan infrastruktur sesuai prioritas yang telah disepakati pada RKP Desa serta pemerintah Desa Kedungrejo juga selalu melakukan pengawasan terhadap setiap pembangunan infrastruktur yang dilakukan hingga selesai

Hasil dan Pembahasan

D. Struktur Birokrasi

pada penelitian Implementasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dalam Pembangunan di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo pada indikator struktur birokrasi dijumpai hasil bahwa Pemerintah Kedungrejo sebagai pelaksana kebijakan terus mendukung kebijakan yang telah disepakati. Tidak hanya dalam kebijakan, dalam pembangunan infrastruktur juga Pemerintah Desa Kedungrejo telah melaksanakan sesuai dengan prioritas. Namun, hingga saat ini belum ada SOP dan pembentukan tim khusus dalam mengawal pembangunan infrastruktur di Desa Kedungrejo. Pemerintah Desa kedungrejo khususnya Kepala Desa juga bertanggung jawab atas semua pembangunan infrastruktur.

Kesimpulan

Berdasarkan indikator pada pengukuran Implementasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dalam Pembangunan di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. dilihat dari indikator Kesejahteraan, Akses, Kesadaran Kritis, Partisipasi, dan Kontrol. Maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut: pertama, indikator komunikasi dijumpai hasil pemerintah Desa Kedungrejo telah melakukan rapat koordinasi dalam penetapan RPKDes yang menghadirkan Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Warga, Perwakilan Karang Taruna, serta Perwakilan PKK. Hal tersebut bertujuan agar terdapat proses komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa dengan Warga Desa Kedungrejo. Kedua, indikator sumber daya dijumpai hasil yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya lahan yang dimiliki oleh Desa Kedungrejo dapat dikelola dengan baik. Sehingga apa yang menjadi prioritas pembangunan infrastruktur yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik. Ketiga, indikator disposisi dijumpai bahwa pemerintah Desa Kedungrejo telah melaksanakan pembangunan infrastruktur sesuai prioritas yang telah disepakati pada RKP Desa serta pemerintah Desa Kedungrejo juga selalu melakukan pengawalan terhadap setiap pembangunan infrastruktur yang dilakukan hingga selesai. Keempat, indikator struktur birokrasi dijumpai hasil bahwa Pemerintah Kedungrejo sebagai pelaksana kebijakan terus mendukung kebijakan yang telah disepakati. Tidak hanya dalam kebijakan, dalam pembangunan infrastruktur juga Pemerintah Desa Kedungrejo telah melaksanakan sesuai dengan prioritas. Namun, hingga saat ini belum ada SOP dan pembentukan tim khusus dalam megawal pembangunan infrastruktur di Desa Kedungrejo.

Referensi

Referensi

1. Latif, A., Irwan, & Mustanir, A. (2019). *Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan*. 144–164.
2. Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>
3. Alfiaturrahman, P. (2016). Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Valuta*, 2(2), 251–267.
4. Manghayu, A. (2018). Perencanaan pembangunan partisipatif dalam penerapan e-musrenbang. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5(5), 95–115.
5. Latif, A., Irwan, & Mustanir, A. (2019). *Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan*. 144–164.
6. Kadir, A., Widarini, K. N., Gunawan, D. I., & Puspitasari, D. (2017). The Indonesian Perspectives on Village Financial Management Accountability. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 1(04), 243–251.
7. Ayub, Z., Rianti, M., Awaluddin, M., Triadi, F., Tinggi, S., & Puangrimaggalatung, I. A. (2020). Community Participation in Village Fund Management within Palakka District, Bone Regency of South Sulawesi, Indonesia. *An Interdisciplinary Journal of Human Theory and Praxis*, 3(3), 38–48.
8. Ayub, Z., Rianti, M., Awaluddin, M., Triadi, F., Tinggi, S., & Puangrimaggalatung, I. A. (2020). Community Participation in Village Fund Management within Palakka District, Bone Regency of South Sulawesi, Indonesia. *An Interdisciplinary Journal of Human Theory and Praxis*, 3(3), 38–48.
9. Kessa, W. (2015). Buku 6 : Perencanaan Pembangunan Desa. *Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia*, 67.
10. Saraswati, S., & Hariyanto, N. (2019). Teknik Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA). *Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia*, 4(5).
11. Fitriyah, N. (2022). Authority, Political Rhetoric and Language Actions of Local Elites in Village Development Planning Deliberations (Musrenbangdes). *International Journal of Management Studies and Social Science Research*, 4(03), 210–216.
12. A. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
13. Rahmat. P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. *In Journal Equilibrium: Vol. 5 No. 9* (pp. 1-8).
14. Yunengsih, S., & Syahrilfuddin, S. (2020). the Analysis of Giving Rewards By the Teacher in Learning Mathematics Grade 5 Students of Sd Negeri 184 Pekanbaru. *JURNAL PAJAR (Pendidikan Dan Pengajaran)*, 4(4), 715. <https://doi.org/10.33578/pjr.v4i4.8029>

